

ANALISIS KINERJA DAN SEKTOR STRATEGIS BELANJA DAERAH: STUDI KASUS DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

Ninda Rizkia Winanti¹, Muhtarudin²

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ²Program Studi Komputerisasi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital

³Universitas Terbuka Bandung, Jl. Raya Panyileukan No.1A, 40614

³Institut Digital Ekonomi LPKIA, Jl. Soekarno Hatta, No. 456, 40266

¹nindarizkiawinanti@gmail.com, ²muhtar@lpkia.ac.id

Abstrak

Belanja daerah merupakan salah satu komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memegang peran sentral dalam merepresentasikan realisasi program pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja dan sektor strategis belanja daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Analisis menggunakan metode triangulasi data, yaitu dengan mengkombinasikan data sekunder dari Laporan Keuangan dan dokumen keuangan lainnya dengan data hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek kinerja belanja, varians bernilai positif (Favorable), dengan pertumbuhan sebesar 35,68%, dan rasio efisiensi sebesar 97,50%, mengindikasikan pengelolaan anggaran yang efisien. Namun dalam hal keserasian, komposisi belanja masih didominasi oleh belanja operasional (98,93%). Dari aspek sektor strategis, belanja terbesar dialokasikan untuk jenis Belanja Barang dan Jasa (68%), pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (60%), dengan Bagian Humas sebagai unit kerja strategis (41%) dan realisasi belanja tertinggi terjadi pada Triwulan IV.

Kata kunci : *Analisis Kinerja, Sektor Strategis, Belanja Daerah*

1. Pendahuluan

Otonomi daerah merupakan perwujudan proses desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berperan sebagai instrumen utama pengelolaan keuangan yang mencerminkan pelaksanaan otonomi daerah secara nyata. Melalui APBD, pemerintah daerah merancang dan melaksanakan kebijakan fiskal yang selaras dengan potensi, karakteristik, dan kebutuhan spesifik daerahnya. APBD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan anggaran, tetapi juga sebagai alat strategis yang mencerminkan prioritas pembangunan dan arah kebijakan publik. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan APBD menjadi indikator penting keberhasilan otonomi daerah, karena menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu

pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Di antara ketiganya, belanja daerah memegang peran sentral dalam merepresentasikan realisasi program pembangunan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Semua pengeluaran ini harus mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik (good governance) serta mampu dipertanggungjawabkan. Pengelolaan belanja daerah dapat terukur dari kinerja keuangannya. Kinerja keuangan daerah mengacu pada sejauh pengelolaan keuangan dapat direalisasikan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran untuk mendukung pembangunan daerah. Menurut Putra terdapat beberapa factor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, antara lain belanja pemerintah, independent financing, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), rasio pajak, rasio retribusi, ukuran dari Pemda, dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) (Putra, 2022).

Masalah klasik yang kerap kali terulang terkait kinerja belanja daerah adalah lambatnya eksekusi realisasi anggaran yang mengakibatkan penumpukan realisasi di akhir tahun. Budiyantri mengungkapkan, menjelang akhir tahun 2023 realisasi anggaran belanja pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, belum terserap maksimal. Realisasi belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp1.662,38 triliun atau sekitar 74 persen, sementara realisasi belanja pemerintah daerah sebesar Rp820,71 triliun atau sekitar 64 persen (Budiyantri, 2023). Di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah sendiri realisasi belanja tercatat sebesar Rp 347.403.488.835 atau sekitar 71,11 persen pada triwulan ketiga tahun 2023. Lambatnya eksekusi realisasi anggaran salah satunya disebabkan oleh proses perencanaan dari belanja itu sendiri. Ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran bukan hanya persoalan teknis, tetapi mencerminkan tantangan struktural dan kelembagaan. Permasalahan tersebut berakar pada hal-hal yang lebih fundamental, seperti lemahnya perencanaan, kurangnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kapasitas aparatur, atau tidak efektifnya sistem birokrasi yang berlaku di daerah. Bahkan bisa jadi terkait dengan persoalan tata kelola pemerintahan dan budaya organisasi. Akibatnya, muncul tuntutan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan dan evaluasi agar dana public dapat digunakan secara optimal dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan analisis mendalam terkait belanja daerah.

Pada penelitian terdahulu telah ditemukan beberapa studi yang mengkaji kinerja keuangan daerah, di antaranya:

1. Penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur”. Saputra dkk. menganalisis kinerja belanja pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur yang mencakup analisis varians belanja, pertumbuhan belanja, keserasian belanja dan efisiensi belanja periode 2014 – 2018 (Saputra, Latif, & Haryadi, 2020).
2. Penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang”. Chartady dkk. menganalisis kinerja belanja pada Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang yang mencakup analisis varians belanja, pertumbuhan belanja, keserasian belanja dan efisiensi belanja periode 2019 – 2020 (Chartady, Meifari, Wulandari, & Utami, 2022).
3. Penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2020”. Syamsuddin dkk. Menganalisis kinerja belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat yang mencakup analisis varians belanja,

pertumbuhan belanja, keserasian belanja dan efisiensi belanja periode 2018 – 2020 (Syamsuddin, Muhammad, & Karim, 2022).

4. Penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Belanja Daerah dalam LRA BPKAD Kabupaten Sukabumi”. Amelia menganalisis kinerja belanja pada BPKAD Kabupaten Sukabumi yang mencakup analisis varians belanja, pertumbuhan belanja, keserasian belanja dan efisiensi belanja periode 2018 – 2020 (Amelia, 2022).
5. Penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Belanja Daerah di Kabupaten Sarolangun”. Andriani menganalisis kinerja belanja pada Kabupaten Sarolangun yang mencakup analisis perkembangan belanja, pertumbuhan belanja, keserasian belanja dan efisiensi belanja periode 2006 – 2012 (Andriani, 2020).

Secara keseluruhan, kelima penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis kinerja belanja berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada instansi atau daerah tertentu. Fokus utama penelitian terdapat pada pengukuran kinerja belanja berdasarkan varians, perkembangan, pertumbuhan, keserasian, dan efisiensi belanja. Pendekatan ini sejalan dengan teori penganggaran berbasis kinerja (performance budget). Menurut Mahmudi, performance budget menekankan pentingnya keterkaitan antara alokasi anggaran (input) dan hasil yang dicapai (output) (Amelia, 2022). Dalam perspektif ini, anggaran digunakan sebagai alat strategis untuk mengukur sejauh mana sumber daya publik digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan.

Namun demikian, sebagian besar studi terdahulu masih terbatas pada analisis teknis terhadap data LRA dan belum mengintegrasikan sektor strategis dari belanja publik, yang mempengaruhi kinerja lembaga legislatif daerah. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, sektor strategis merujuk pada sektor-sektor yang memiliki peran signifikan terhadap pencapaian visi/misi daerah. Oleh karena itu, penelitian semacam ini menjadi relevan dan penting dilakukan untuk memberikan informasi terkait belanja daerah secara lebih optimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja sekaligus sektor strategis belanja daerah pada DPRD Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat bagaimana kinerja belanja daerah, khususnya di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Pendekatan deskriptif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena secara mendalam dan kontekstual, sebagaimana diungkapkan oleh Ambar & Rosidah, bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai

objek penelitian (Syamsuddin, Muhammad, & Karim, 2022). Pendekatan deskriptif tidak mencari atau menerangkan saling hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi (Aslichati, Prasetyo, & Prasetya, 2022). Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni 2025. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak instansi, sedangkan data sekunder diperoleh dari Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 serta dokumen keuangan relevan lainnya. Analisis menggunakan metode triangulasi data, yaitu dengan mengkombinasikan data sekunder dari dokumen keuangan dengan data hasil wawancara. Tujuan dari triangulasi ini adalah untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan akurat mengenai kinerja belanja daerah.

Analisis kinerja belanja menggunakan alat analisis kinerja belanja daerah yang mencakup analisis varians, keserasian, efisiensi, dan pertumbuhan, serta dilengkapi dengan analisis sektor belanja strategis. Analisis sektor strategis mencakup analisis berdasarkan jenis belanja, program/kegiatan prioritas daerah, unit kerja pelaksana, dan triwulan. Analisis tersebut kemudian didukung oleh informasi kontekstual dari instansi terkait yang diperoleh melalui wawancara dengan Penyusun Laporan Keuangan dan Pengelola Akuntansi di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wawancara dengan Penyusun Laporan Keuangan akan difokuskan untuk memperkuat informasi pada analisis kinerja belanja. Sementara itu, wawancara dengan Pengelola Akuntansi difokuskan untuk memperkuat informasi pada analisis sektor strategis.

3. Hasil dan Pembahasan

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah berkedudukan sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan tugas dan fungsi terhadap DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Salah satu fungsi Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD, yang mencakup seluruh kegiatan pengelolaan anggaran dan belanja yang digunakan oleh DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya. Di Sekretariat DPRD, belanja daerah memegang peran penting dalam merepresentasikan realisasi program pemerintah daerah, karena belanja yang dialokasikan tidak hanya untuk membiayai operasional kelembagaan, tetapi juga untuk mendukung fungsi utama DPRD seperti legislasi, pengawasan, dan anggaran. Besaran dan struktur belanja Sekretariat DPRD menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah memberikan dukungan anggaran

terhadap peran strategis DPRD dalam pembangunan daerah. Dukungan tersebut nantinya akan dipertanggung jawabkan sebagai informasi publik melalui laporan keuangan.

Komposisi belanja daerah Sekretariat DPRD disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Mengacu pada peraturan tersebut, struktur belanja daerah tahun 2023 terdiri dari Belanja Operasi yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek dan Belanja Modal yang merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan. Informasi terkait struktur, anggaran dan realisasi belanja daerah dalam satu periode tercermin dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Table 1. Pos Belanja pada LRA Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN ANGGARAN 2023 periode 1 Januari s.d 31 Desember 2023				
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/Kurang (Rp)
BELANJA DAERAH	488.532.117.000	476.337.213.551	97,50	12.194.903.449
BELANJA OPERASI	480.199.669.000	471.231.833.551	97,52	11.966.835.449
Belanja Pegawai	146.028.517.000	145.647.411.446	99,74	381.125.554
Belanja Barang dan Jasa	337.171.132.000	325.585.422.105	96,56	11.585.709.895
BELANJA MODAL	8.332.448.000	5.104.380.000	61,25	3.228.068.000
Belanja Modal Perakitan dan Micon	5.312.448.000	5.104.380.000	95,72	228.068.000
Jumlah Belanja	488.532.117.000	476.337.213.551	97,50	12.194.903.449

Sumber: LRA Sat. DPRD Prov. Jateng Tahun 2023

3.1 Analisis Kinerja

Mahmudi mengemukakan bahwa analisis kinerja belanja daerah merupakan hal yang penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah penggunaan APBD oleh pemerintah daerah telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif (Saputra, Latif, & Haryadi, 2020). Alat analisis kinerja belanja daerah mencakup analisis varians, keserasian, efisiensi, dan pertumbuhan.

3.1.1 Analisis Varians

Niansyah dan Biswan mengungkapkan, “Varians merupakan suatu indikasi yang sebaiknya diidentifikasi dan dianalisis guna memperbaiki proses kerja” (Niansyah & Biswan, 2018). Analisis varians pada instansi pemerintahan dihitung dengan mencari selisih antara anggaran dan realisasi belanja pada tahun bersangkutan. Jika kondisi yang terjadi jumlah anggaran lebih besar dari realisasinya, maka termasuk dalam kategori Favorable (F). Sebaliknya jika realisasi lebih besar dari jumlah anggaran, maka termasuk dalam kategori Unfavorable (U). Mengacu pada data LRA maka varians belanja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2023 adalah,

$$\begin{aligned}\text{Varians} &= \text{Anggaran Belanja} - \text{Realisasi Belanja} \\ &= \text{Rp}477.532.117.000 - \text{Rp}476.337.213.551 \\ &= \text{Rp } 12.194.903.449 \text{ (F)}\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan, varians belanja di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

bernilai positif sebesar Rp12.194.903.449. Nilai positif menunjukkan bahwa jumlah anggaran belanja di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah lebih besar dibanding realisasinya sehingga termasuk dalam kategori Favorable (F). Penyusun Laporan Keuangan Sekretariat DPRD mengemukakan bahwa varians belanja selalu bernilai positif. Hal tersebut sejalan dengan prinsip penganggaran, di mana perangkat daerah tidak diperbolehkan melakukan pengeluaran melebihi alokasi anggaran yang telah ditetapkan, kecuali dalam kondisi mendesak di mana harus dilakukan proses revisi anggaran dengan persetujuan otoritas yang berwenang.

3.1.2 Analisis Pertumbuhan Belanja

Djaenuri mengungkapkan, pada kenyataannya, pengeluaran pemerintah memiliki kecenderungan mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun di negara sedang berkembang karena menjalankan fungsi sebagai agent of development dan seiring pula dengan peningkatan ekonomi suatu negara (Nahumuri, 2019). Adanya analisis pertumbuhan belanja penting untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pertumbuhan belanja dapat dihitung dengan rumus,

$$\text{Pertumbuhan Belanja tahun } t = \frac{\text{Realisasi Belanja tahun } t - \text{Realisasi Belanja tahun } t-1}{\text{Realisasi Belanja tahun } t-1} \times 100\%$$

Tabel 2. Pertumbuhan Belanja pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Realisasi (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
2021	236.523.090.077	-
2022	351.064.987.793	+48,42
2023	476.337.213.551	+35,68

Sumber: Data diolah 2023

Berdasarkan Tabel 2, realisasi belanja di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah menunjukkan pertumbuhan positif dari tahun 2021 ke 2022 sebesar 48,42% (Rp114.541.897.716). Pada tahun 2023, meskipun persentase kenaikan tidak sebesar tahun sebelumnya, realisasi belanja tetap mengalami pertumbuhan positif sebesar 35,68% (Rp125.272.225.758). Penyusun Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, mengungkapkan kenaikan belanja pada tahun 2023 terutama disebabkan oleh kenaikan pada belanja barang dan jasa untuk kegiatan kedewanan berupa penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Perda/Nonperda, Media Tradisional, Penguatan Demokrasi Daerah serta Forum Group Discussion yang mulai diadakan pada akhir tahun 2022 yang kemudian diperhitungkan pada perencanaan anggaran tahun 2023.

3.1.3 Analisis Kecerasan

Analisis keserasian belanja merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keseimbangan antara belanja operasional dan belanja

modal dalam anggaran pemerintah daerah. Analisis keserasian terdiri dari dua perhitungan, yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Analisis belanja operasi terhadap total belanja memberikan informasi terkait porsi pengeluaran anggaran untuk kegiatan rutin yang memberi manfaat jangka pendek pada tahun yang bersangkutan. Analisis ini dihitung dengan perbandingan antara realisasi belanja operasi terhadap total belanja.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Operasional} &= \frac{\text{Realisasi Belanja Operasional}}{\text{Realisasi Total Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{471.232.833.551}{476.337.213.551} \times 100\% \\ &= 98,93\% \end{aligned}$$

Sementara itu, analisis belanja modal terhadap total belanja memberikan informasi terkait pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Analisis ini dihitung dengan perbandingan antara realisasi belanja modal terhadap total belanja.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Modal} &= \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Realisasi Total Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{5.104.380.000}{476.337.213.551} \times 100\% \\ &= 1,07\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan rasio belanja operasional dan belanja modal terhadap total belanja dapat diketahui bahwa kinerja belanja di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 belum berimbang. Hal ini karena sebagian besar porsi APBD (sebesar 98,93%) dialokasikan hanya untuk belanja operasional. Penyusun Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah mengemukakan, porsi belanja operasional memang mendominasi keseluruhan belanja pada Sekretariat DPRD. Hal ini mengingat kedudukan Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan tugas dan fungsi DPRD. Dengan demikian, pengalokasian anggaran lebih banyak diarahkan untuk kegiatan operasional rutin kedewanan di samping belanja pegawai.

3.1.4 Analisis Efisiensi

Efisiensi dalam pengelolaan anggaran merupakan indikator kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan atau hasil yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan seminimal mungkin (Supriyanto, 2024). Konsep ini mencakup upaya untuk meminimalkan pemborosan, baik dalam bentuk pengeluaran yang tidak diperlukan maupun dalam hal alokasi sumber daya yang kurang tepat untuk menghasilkan output dan outcome yang maksimal. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadinya pemborosan anggaran. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio Efisiensi Belanja} &= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{476.337.213.551}{488.532.117.000} \times 100\% \\ &= 97,50\% \text{ (efisien)}\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan, rasio efisiensi belanja di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 97,50%. Rasio efisiensi di bawah 100% pada Sekretariat DPRD Jawa Tengah menunjukkan kinerja belanja yang efisien. Penyusun Laporan Keuangan mengemukakan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 memang menerapkan efisiensi pada beberapa belanjanya, seperti belanja perjalanan dinas. Dilihat dari perspektif kinerja belanja secara keseluruhan, pada dasarnya hasil pengukuran kinerja belanja dengan alat analisis berupa varians, pertumbuhan, keserasian, dan efisiensi di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 menunjukkan hasil yang serupa dengan penelitian oleh Syamsuddin dkk. Penelitian yang dilakukan pada KPU Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 – 2020 tersebut menunjukkan hasil bahwa varians dan pertumbuhan belanja bernilai positif, terdapat efisiensi pada realisasi belanja serta belanja operasi yang lebih dominan dari belanja operasional dari segi keserasian (Syamsuddin, Muhammad, & Karim, 2022).

3.2 Analisis Sektor Strategis

Alokasi anggaran merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal daerah untuk mendorong pembangunan yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam mengalokasikan APBD, pemerintah daerah perlu memperhatikan sektor-sektor yang menjadi prioritas daerah agar pelaksanaan anggaran dapat tepat sasaran. Sektor strategis merujuk pada sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan. Analisis ini mengidentifikasi sektor-sektor strategis dalam struktur belanja daerah melalui pengelompokan belanja berdasarkan jenis belanja, program/kegiatan, unit kerja pelaksana, serta periode pelaksanaan anggaran per triwulan. Analisis menggunakan angka realisasi anggaran belanja tahun 2023.

3.2.1 Analisis Jenis Belanja

Penyajian pos belanja dalam LRA Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2023 mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dalam regulasi tersebut, belanja daerah diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, Sekretariat DPRD hanya merealisasikan dua jenis belanja, yakni belanja operasional dan belanja modal. Hal ini disebabkan karena pengelolaan belanja tidak terduga dan belanja transfer berada di bawah kewenangan Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) sekaligus Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1, pada Tahun Anggaran 2023, pos Belanja Operasional Sekretariat DPRD terdiri atas Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa. Sementara itu, pos Belanja Modal hanya mencakup Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Komponen belanja terbesar terdapat pada Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi anggaran sebesar Rp325.585.422.105 atau sekitar 68% dari total belanja. Posisi selanjutnya ditempati oleh Belanja Pegawai sebesar Rp145.647.411.440 (31%), dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.104.380.000 (1%). Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengelola Akuntansi Sekretariat DPRD, diketahui bahwa memang terjadi peningkatan signifikan pada pos Belanja Barang dan Jasa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya volume kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh sekitar 120 anggota DPRD. Kegiatan sosialisasi tersebut mencakup Sosialisasi Perda/Nonperda, Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah, dan Sosialisasi melalui Media Tradisional.

Gambar 1. Persentase Belanja Berdasarkan Jenisnya



Sumber : Data diolah 2025

3.2.2 Analisis Program/Kegiatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai satuan kerja perangkat daerah, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah didukung oleh dua program utama, yaitu Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Penamaan kedua program tersebut mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta telah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2023. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi terdiri atas sembilan kegiatan, sementara Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD mencakup delapan kegiatan.

Tabel 3. Realisasi Belanja berdasarkan Program Kegiatan

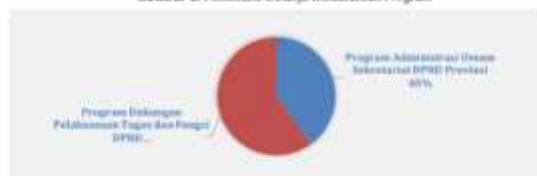
Uraian	Realisasi (Rp)
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI	190.701.884.307
Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.105.904.469
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.314.848.712
Administrasi (Bagian Misk Daerah pada Perangkat Daerah	998.857.350
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	552.145.907
Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.048.558.877
Pengadaan Barang Misk Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	7.751.444.820
Pelayanan Jasa Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	19.069.214.353
Pertukaran Barang Misk Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	9.843.976.756
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	129.036.537.453
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	285.636.129.244
Pemberikan Perda dan Peraturan DPRD	3.583.198.811
Pembahasan Kerjasama Anggaran	8.742.332.423
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan	105.672.739.447
Pengelolaan Kapasitas DPRD	47.521.362.562
Penyusunan dan Pengawasan Anggaran Masyarakat	351.144.000
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	91.907.676.884
Pertemuan Kerja Sama Daerah	23.775.107.997
Total Belanja	476.337.213.551

Sumber: LK/JP Set. DPRD Prov. Jateng Tahun 2023

Berdasarkan data pada Tabel 3, Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD menunjukkan realisasi anggaran sebesar Rp285.636.129.244 atau sekitar 60% dari total belanja Sekretariat DPRD. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah yang mencapai Rp190.701.084.307 atau sebesar 40%. Secara lebih rinci dilihat dari sektor kegiatan, realisasi belanja terbesar terdapat pada Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dengan nilai sebesar Rp129.036.537.453 (27%), diikuti oleh Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD sebesar Rp105.672.739.447 (22%), serta Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah sebesar Rp91.907.676.884 (19%).

Menurut keterangan dari Pengelola Akuntansi, tingginya nilai realisasi belanja pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dikarenakan program ini secara langsung mendukung pelaksanaan fasilitasi kegiatan kedewanan seperti rapat, reses, kunjungan daerah pilihan, serta kegiatan sosialisasi. Dari sektor kegiatan sendiri, tingginya realisasi belanja pada Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD disebabkan oleh adanya pengalokasian belanja untuk pembayaran gaji, tunjangan dan dana operasional anggota DPRD. Pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD pengeluaran didominasi untuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Perda/Nonperda dan Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah. Sementara pada Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah pengeluaran didominasi untuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi melalui Media Tradisional.

Gambar 2. Persentase Belanja Berdasarkan Program



Sumber: Data diolah 2023

3.2.3 Analisis Unit Kerja

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2021, Sekretariat DPRD terdiri dari empat unit kerja bagian, yaitu Bagian Keuangan, Bagian Umum, Bagian Humas dan Bagian

Persidangan. masih-masing bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang sekaligus merupakan Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) yang bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan, termasuk pengeluaran belanja.

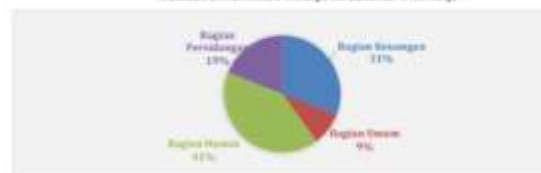
Tabel 4. Realisasi Belanja berdasarkan Unit Kerja

Uraian	Realisasi (Rp)
Bagian Keuangan	146.984.211.875
Bagian Umum	43.716.872.432
Bagian Humas	195.080.660.331
Bagian Persidangan	90.555.468.913
Total Belanja	476.337.213.551

Sumber: Aplikasi e-Government Jawa Tengah 2023

Berdasarkan data Tabel 4, realisasi belanja terbesar selama Tahun Anggaran 2023 terdapat pada Bagian Humas yaitu sebesar Rp195.080.660.33 (atau sekitar 41% dari total belanja. Selanjutnya, Bagian Keuangan mencatat realisasi sebesar Rp146.984.211.875 (31%), diikuti oleh Bagian Persidangan sebesar Rp90.555.468.913 (19%), dan yang terendah terdapat pada Bagian Umum dengan nilai sebesar Rp43.716.872.432 (9%). Pengelola Akuntansi mengungkapkan tingginya proporsi belanja pada Bagian Humas disebabkan oleh peran strategis bagian ini sebagai pelaksana Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, di mana di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan dengan realisasi anggaran terbesar seperti Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dan Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah.

Gambar 3. Persentase Belanja berdasarkan Unit Kerja



Sumber: Data diolah 2023

3.2.4 Analisis Periode Triwulan

Dalam rangka mewujudkan disiplin pelaksanaan APBD, Sekretariat DPRD tidak hanya menyusun laporan capaian keuangan tahunan, tetapi juga melaksanakan pelaporan kinerja keuangan setiap triwulan. Pengelolaan informasi anggaran secara triwulanan memungkinkan Sekretariat DPRD untuk melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pelaksanaan anggaran, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul di lapangan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pada periode-periode berikutnya.

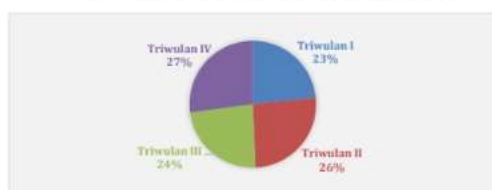
Tabel 5. Realisasi Belanja berdasarkan Periode Triwulanan

Uraian	Realisasi
Triwulan I	111.253.517.339
Triwulan II	123.450.355.387
Triwulan III	112.699.616.109
Triwulan IV	128.933.724.716
Total Belanja	476.337.213.551

Sumber: Aplikasi e-Government Jawa Tengah 2023

Berdasarkan data dari Tabel 5, diketahui bahwa selama empat periode triwulanan persentase realisasi belanja cukup merata. Realisasi terbesar terdapat pada Triwulan IV yaitu sebesar Rp476.337.213.551 atau sekitar 27% dari total belanja. Selanjutnya pada Triwulan II sebesar Rp123.450.355.387 (26%). Lalu triwulan III sebesar Rp112.699.616.109 dan Triwulan I sebesar Rp111.253.517.339 (23%). Menurut keterangan Pengelola Akuntansi, tingginya realisasi belanja pada Triwulan IV disebabkan oleh adanya peningkatan volume kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, serta tambahan kegiatan “Wakil Rakyat Mengajar” yang melibatkan lima pimpinan DPRD selama periode Oktober hingga Desember. Kegiatan-kegiatan tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap total belanja pada akhir anggaran.

Gambar 4. Persentase Belanja berdasarkan Periode Triwulan



Sumber : Data diolah 2025

Ditinjau secara keseluruhan, hasil analisis pada sektor strategis menunjukkan bahwa belanja di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 banyak dialokasikan untuk memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Hal tersebut sejalan dengan kedudukan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah selaku unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan tugas dan fungsi terhadap DPRD.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di mengenai analisis kinerja dan sector strategis pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis kinerja belanja daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, varians belanja bernilai positif (Favorable), menunjukkan bahwa realisasi anggaran tidak melebihi alokasi yang ditetapkan. Pertumbuhan belanja juga mengalami peningkatan signifikan selama 2021 – 2023, terutama didorong peningkatan pada belanja operasional. Pengelolaan anggaran menunjukkan efisiensi dengan rasio efisiensi sebesar 97,50%. Namun, komposisi belanja masih didominasi oleh belanja operasional (98,93%) dengan porsi belanja modal yang sangat kecil (1,07%), sehingga masih jauh untuk disebut seimbang.

2. Berdasarkan analisis sektor strategis belanja daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, diperoleh beberapa temuan penting. Ditinjau dari jenis belanja, sektor strategis terdapat pada Belanja Barang dan Jasa, yang menyerap sebesar 68% dari total realisasi belanja. Jika dilihat dari aspek program dan kegiatan, sektor strategis teridentifikasi pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan porsi realisasi sebesar 60%, dan Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Anggota DPRD dengan kontribusi sebesar 27%. Sementara itu, berdasarkan unit kerja pelaksana, Bagian Humas merupakan unit kerja strategis dengan proporsi realisasi belanja tertinggi, yaitu sebesar 41%. Adapun dari sisi periode pelaksanaan anggaran, realisasi tertinggi terjadi pada Triwulan IV, yang menunjukkan konsentrasi belanja pada akhir tahun anggaran. Secarakeseluruhan, hasil analisis mencerminkan bahwa prioritas belanja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah berfokus pada pemberian dukungan layanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan DPRD.

4.2 Saran

1. Mengingat kecilnya proporsi belanja modal, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah kiranya dapat lebih mendorong realokasi anggaran dari belanja rutin (belanja operasional) menuju belanja investasi (belanja modal) yang memiliki potensi untuk meningkatkan capaian kinerja kelembagaan dan berdampak terhadap peningkatan produktivitas, efisiensi pelayanan, serta mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara berkelanjutan.
2. Mengingat keterbatasan waktu penelitian yang hanya mencakup satu tahun anggaran (2023), diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan waktu penelitian untuk melihat tren belanja daerah dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amelia, S. (2022). Analisis Kinerja Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi. JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz, 5(1), 76-84.
- [2] Andriani, I. (2020). Analisis Kinerja Belanja Daerah di Kabupaten Sarolangun. Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu), 9(02), 120-128.
- [3] Chartady, R., Meifari, V., Wulandari, T., & Utami, R. (2022). Analisis kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran (LRA). Open Journal Systems, 17(1), 93-100.
- [4] Nahumuri, L. L. (2019). Esensi Dan Urgensi Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan

- Daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, 4(1), 1-12.
<https://doi.org/10.33701/jipsk.v4i1.597>
- [5] Niansyah, F. I., & Biswan, A. T. (2018). Analisis Varians Anggaran Belanja untuk Pengukuran Kinerja (Studi Terapan pada KPP Badan dan Orang Asing). Jurnal Perbendaharaan, Keuangan negara dan Kebijakan Publik, 3(04), 348-363.
- [6] Putra, S. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 - 2020. Jurnal Manajemen Perbendaharaan, 3(1), 1-13.
doi: <https://doi.org/10.33105/jmp.v3i1.388>.
- [7] Saputra, E., Latif, I. N., & Haryadi, R. M. (2020). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur. 9, 271-281.
- [8] Syamsuddin, I., Muhammad, P. N., & Karim, A. (2022). Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2020. YUME : Journal of Management, 5(2), 170-177. doi: <https://doi.org/10.2568/yum.v5i2.1557>
- [9] Aslichati, L., Prasetyo, B., & Prasetya, I. (2022). Metode Penelitian Sosial. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- [10] Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023. (2024). Semarang: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
- [11] Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. (2024). Semarang: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
- [12] Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. (2021).
- [13] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. (2019).
- [14] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2019).
- [15] Budiyan, E. (2023, November). Rendahnya Realisasi Anggaran Pemerintah Menjelang Akhir Tahun 2023. pp. 1-2.
- [16] Supriyanto, B. E. (2024, Agustus 13). Efisiensi Pengelolaan Anggaran: Mengurangi Pemborosan dan Meningkatkan Hasil. Retrieved from Kementerian Keuangan RI: DJPB, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Watampone: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/i/d/data-publikasi/berita-terbaru/3686-efisiensi-pengelolaan-anggaran-mengurangi-pemborosan-dan-meningkatkan-hasil.html>